



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN

RENCANA KERJA TAHUN 2025

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sehingga diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki keterkaitan dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan Masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Dokumen Renja menjadi dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memasukkan program, kegiatan dan sub. kegiatan didalam KUA dan PPAS serta rencana program, kegiatan dan sub. kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Kesatuan bangsa dan politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat fungsi sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran, serta program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja bagi Organisasi Perangkat Daerah merupakan dasar penyusunan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah. Selain itu dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dapat dilihat pada gambar berikut :



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang

- Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah;
 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
 17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
 18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.
 19. Peraturan Bupati Pasuruan NomorTahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor ...).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan ini, adalah:

1. Sebagai pedoman dalam koordinasi lintas pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber pendanaan;

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan ini, adalah:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
2. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan, dan akuntabel serta konsisten dengan dengan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bakesbangpol dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.
5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Adapun Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
2. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;
3. Pembauran kebangsaan direfleksikan dalam bentuk cinta tanah air, antara lain: harus mengenal, memahami, mencintai wilayah, menjaga lingkungan sekitar sehingga dapat mencegah terjadinya AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) dari manapun;
4. Meningkatkan kerjasama antara lembaga / instansi pemerintah, Kabupaten / Kota, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam pelaporan kejadian Ipoleksosbudhankam di daerah.
5. Meningkatkan sinergitas, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui teknologi informasi yang memadai.
6. Meningkatkan soliditas dan komunikasi dengan aparat intelijen, lembaga / instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan yang dapat mendukung tumbuhnya investasi di daerah.
7. Mendorong kepada lembaga / instansi / masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
 - 3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025
 - 3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis
 - 3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 serta pendanaannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan serta Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran pada Tahun 2023 tidak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar Rp 103.518.250.332 dengan realisasi sebesar Rp 100.154.257.043 (96,75%) dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin. Adapun realisasi untuk setiap program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 mendapat alokasi dana sebesar Rp 4.817.499.912 terealisasi sebesar Rp 4.463.369.005 (92,65%) dengan capaian kinerja sebesar 96,72%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.668.000 terealisasi sebesar Rp 27.063.000 (97,81%) dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 14.418.000,00 terealisasi sebesar Rp 14.118.000,00 (97,92%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 13.250.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.945.000,00 (97,70%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 3.963.527.960,00 terealisasi Rp 3.628.548.763,00 (91,55%) dengan capaian kinerja sebesar 90,62% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 3.469.286.180 terealisasi sebesar Rp 3.153.356.983 (90,89%) dengan capaian kinerja sebesar 71,88%.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 396.261.780 terealisasi sebesar Rp 394.461.780 (99,55%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 97.980.000 terealisasi sebesar Rp 80.730.000 (82,39%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 74.945.140,00 terealisasi sebesar Rp 73.955.000,00 (98,68%) dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 748.140 terealisasi Rp. 748.000,- (99,98%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar Rp 74.197.000,00 terealisasi sebesar Rp 73.207.000,00 (98,67%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 279.692.900,00 terealisasi sebesar Rp 278.432.240,00 (99,55%) dengan capaian kinerja sebesar 96,43% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 1.594.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.522.000,00 (95,48%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp 7.173.000,00 terealisasi sebesar Rp 7.055.000,00 (98,35%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 45.118.300,00 terealisasi sebesar Rp 44.997.490,00 (99,73%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 18.282.600 terealisasi sebesar Rp 18.253.500 (99,84%) dengan capaian kinerja sebesar 75,00%.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp 16.650.000,00 terealisasi sebesar Rp 15.580.000,00 (99,58%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 11.725.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.450.000,00 (97,65%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 7) Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 179.150.000,00 terealisasi sebesar Rp 178.574.250,00 (99,68%) dengan capaian kinerja 100%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana Rp 152.844.210,00 terealisasi sebesar Rp 147.150.000,00 (96,27%) dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 22.185.000,00 terealisasi sebesar Rp 20.700.000,00 (93,31%) dengan capaian

- kinerja sebesar 100%.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 130.659.210,00 terealisasi sebesar Rp 126.450.00,00 (95,43%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 43.355.802,00 terealisasi sebesar Rp 34.844.152,00 (88,37%) dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 43.355.802 terealisasi sebesar Rp 34.844.152 (80,37%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana Rp 343.670.660,00 terealisasi sebesar Rp 274.465.900,00 (99,24%) dengan capaian kinerja sebesar 90,00% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 266.467.000 terealisasi sebesar Rp 273.375.850 (99,24%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 8.998.900,00 terealisasi sebesar Rp 7.400.000,00 (82,23%) dengan capaian kinerja sebesar 80,00%.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tahun 2023 mendapat alokasi dana sebesar Rp 12.279.010.620,00 terealisasi sebesar Rp 10.949.227.170,00 (89,17%) dengan capaian kinerja sebesar 88,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi dana Rp 12.279.010.620,00 terealisasi sebesar Rp 10.949.227.170,00 (89,17%) dengan capaian kinerja sebesar 85,00% dari target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 12.279.010.620,00 terealisasi sebesar Rp 10.949.227.170,00 (89,17%) dengan capaian kinerja sebesar 85,00%.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik tahun 2023 dengan alokasi dana sebesar Rp 50.507.028.600,00 terealisasi sebesar Rp 50.062.402.031,00 (99,12%) dengan capaian kinerja sebesar 73,92%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi dana sebesar Rp 50.507.028.600,00 terealisasi sebesar Rp 50.062.402.031,00 (99,12%) dengan capaian kinerja sebesar 89,00% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp 50.507.028.600,00 terealisasi sebesar Rp 50.062.402.031,00 (99,12%) dengan capaian kinerja sebesar 89,00%.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023 mendapat alokasi dana Rp 16.074.469.400,00 terealisasi sebesar Rp 15.770.225.607,00 (98,11%) dengan capaian kinerja sebesar 50,00%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp 16.074.469.400,00 terealisasi sebesar Rp 15.770.225.607,00 (98,11%) dengan capaian kinerja sebesar 50,00% dari target sebesar 100%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran Rp 16.069.219.400,00 terealisasi sebesar Rp 15.770.225.607,00 (98,14%) dengan capaian kinerja sebesar 91,33% dari target sebesar 100%.

- 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Meiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.250.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,-(0%) dengan capaian kinerja sebesar 0%.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 2023 mendapat alokasi dana sebesar Rp 11.402.189.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.112.715.250,00 (97,46%) dengan capaian kinerja sebesar 89,00%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi dana sebesar Rp 11.402.189.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.112.715.250,00 (97,46%) dengan capaian kinerja sebesar 89,00%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 11.402.189.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.112.715.250,00 (97,46%) dengan capaian kinerja sebesar 89,00%.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik tahun 2023 mendapat alokasi dana sebesar Rp 8.438.052.800,00 terealisasi sebesar Rp 7.796.317.980,00 (92,40%) dengan capaian kinerja sebesar 13,63%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi dana Rp 8.438.052.800,00 terealisasi sebesar Rp 7.796.317.980,00 (92,40%) dengan capaian kinerja sebesar 99,15%, dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 8.243.947.80000,00 terealisasi sebesar Rp 7.616.566.480,00 (92,39%) dengan capaian kinerja sebesar 98,31%.

- 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp 51.791.000,00 terealisasi sebesar Rp 46.550.100,00 (89,88%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 142.314.000,00 terealisasi sebesar Rp 133.201.400,00 (93,60%) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dari hasil capaian kinerja dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kinerja program/kegiatan pada tahun 2023 secara keseluruhan sebagian besar indikator kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai dengan baik namun ada beberapa indikator kinerja capainnya dibawah target, hal ini dikarenakan :

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tercapai 50% dari indicator ormas yang terfasilitasi dibidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dengan target 100%. Hal ini capainya terlalu rendah karena sasaran pelaksanaan sosialisasi adalah masyarakat umum sedangkan ormas terfasilitasi hanya 79 ormas dari seluruh ormas yang terdaftar di Kabupaten Pasuruan sebanyak 158 ormas
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik dengan capaian 13,63% dari indikator persentase penurunan konflik sosial dengan target sebesar 100%. Hal ini tidak proporsional karena targetnya terlalu tinggi bisa tercapai 100% meskipun ditahun ini ada penurunan konflik social dari tahun lalu 22 kasus dan tahun ini menjadi 19 kasus.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tahun 2023, yaitu :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Adanya kerjasama yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan keagamaan, suku, etnis dan golongan lainnya;
4. Adanya kerjasama dengan BNN Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan narkoba.

Dampak yang ditimbulkan dari capaian kinerja Program dan Kegiatan diantaranya :

1. Meningkatnya pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya rasa solidaritas dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
3. Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap kejadian konflik di masyarakat;

4. Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kerjasama dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;
3. Meningkatkan kualitas fasilitasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
4. Meningkatkan kualitas materi sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat kita lihat pada Tabel 2.1 (T-C.29) dan Tabel 2.1.A

Tabel 2.1 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN PASURUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun N-1 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TAHUN 2019 - 2020										
	Unsur Pemerintahan Umum									
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik									
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	168 rek/bln	168 rek/bln	-	-	-	-	168 rek/bln	100%
1 05 01 07	Penyediaan Jasa Administrai Keuangan	Jumlah pembayaran honor Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Keuangan	360 org/bln	360 org/bln	-	-	-	-	360 org/bln	100%
1 05 01 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	98 jenis/kali	98 jenis/kali	-	-	-	-	98 jenis/kali	100%
1 05 01 11	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	5.530 eks	5.530 eks	-	-	-	-	5.530 eks	100%
1 05 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	166 unit	166 unit	-	-	-	-	166 unit	100%

1 05 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	596 unit	596 unit	-	-	-	-	596 unit	100%
1 05 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	17 kali	17 kali	-	-	-	-	17 kali	100%
1 05 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	80 org/kali	80 org/kali	-	-	-	-	80 org/kali	100%
1 05 01 19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	378 org/bln	378 org/bln	-	-	-	-	378 org/bln	100%
1 05 01 23	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja triwulan dan tahunan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100%
1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 02 11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	20 unit	20 unit	-	-	-	-	20 unit	100%
1 05 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	100%
1 05 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	30 unit	30 unit	-	-	-	-	30 unit	100%
1 05 02 29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler	Jumlah pemeliharaan mebeler	10 unit/kali	10 unit/kali	-	-	-	-	10 unit/kali	100%
1 05 02 30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	65 unit/kali	65 unit/kali	-	-	-	-	65 unit/kali	100%

1 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang selesai	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja tribulan dan tahunan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100%
1 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah peserta yang memahami sistem deteksi dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pemantauan keamanan wilayah	6 keg	6 keg	-	-	-	-	6 keg	100%
1 05 15 08	Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	300 org	300 org	-	-	-	-	300 org	100%
1 05 35	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase daerah rawan konflik yang terbina	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 35 01	Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	319 org	319 org	-	-	-	-	319 org	100%

1 05 35 02	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
1 05 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah kelompok masyarakat yang memahami wawasan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 17 03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	20 kali	20 kali	-	-	-	-	20 kali	100%
1 05 17 05	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
1 05 36	Program Kesatuan Bangsa	Persentase kelompok masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 36 01	Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan di Kab. Pasuruan	902 org	902 org	-	-	-	-	902 org	100%
1 05 36 02	Peningkatan Toleransi dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan toleransi dan pemantapan pembauran kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	400 org	400 org	-	-	-	-	400 org	100%

1 05 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase jumlah peserta sosialisasi yang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 20 01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	1.800 org	1.800 org	-	-	-	-	1.800 org	100%
1 05 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah peserta sosialisasi yang memahami etika dan kultur politik	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 21 12	Sosialisasi Desiminasi Hak Sipil Politik Masyarakat Yang Relevan Bagi Perlindungan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi desiminasi hak sipil politik masyarakat yang relevan bagi perlindungan HAM	200 org	200 org	-	-	-	-	200 org	100%
1 05 21 13	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Kultur Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran pemahaman etika dan kultur politik	2.000 org	2.000 org	-	-	-	-	2.000 org	100%
1 05 21 14	Desk Pemilihan Presiden dan Legeslatif Tahun 2019	Jumlah petugas pemantau pelaksanaan Desk Pemilihan Presiden dan Legeslatif Tahun 2019	1.232 org	1.232 org	-	-	-	-	1.232 org	100%

1 05 37	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Persentase kelompok masyarakat dan partai politik yang terfasilitasi pengembangan etika dan budaya politik	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 37 01	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Kultur Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran pemahaman etika dan budaya politik	200 org	200 org	-	-	-	-	200 org	100%
1 05 25	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Persentase kelompok masyarakat yang memahami hukum dan HAM	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 05 25 01	Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama yang Menjamin Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM	400 org	400 org	-	-	-	-	400 org	100%
1 05 25 03	Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
1 05 27	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Persentase Ormas, LSM dan Partai Politik yang aktif	200%	200%	0%	0%	0%	0%	200%	100%

1 05 27 01	Fasilitasi Pemberdayaan Ormas dan LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi pemberdayaan Ormas dan LSM	450 org	450 org	-	-	-	-	450 org	100%
1 05 27 02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi	200 org	200 org	-	-	-	-	200 org	100%
1 05 27 03	Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah perwakilan partai politik yang mengikuti verifikasi bantuan keuangan partai politik	108 org	108 org	-	-	-	-	108 org	100%
1 05 27 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah ormas/LSM yang dimonitor di Kabupaten Pasuruan	80 lemb	80 lemb	-	-	-	-	80 lemb	100%
1 05 27 06	Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemberdayaan ormas/lsm	800 org	800 org	-	-	-	-	800 org	100%
1 05 33	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Persentase peserta sosialisasi yang memahami toleransi antar umat beragama dan antar etnis	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

1 05 33 01	Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama	600 org	600 org	-	-	-	-	600 org	100%
1 05 33 02	Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	175 org	175 org	-	-	-	-	175 org	100%
TAHUN 2021 - 2023										
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	99,02%	100%	97,07%	97,07%	0,00	98,05%	98,05%
8 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	95,00%	100%	100,00%	100,00%	0,00	97,50%	97,50%
8 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	0,00	3 dok	100,00%
8 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja yang disusun	30 lap	12 lap	14 lap	14 lap	100%	0,00	26 lap	86,66%
8 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	97,32%	100%	90,62%	90,62%	0,00	93,97%	93,97%

8 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.176 org/bln	1.042 org/bln	384 org/bln	276 org/bln	71,88%	0,00	1,318 org/bln	95.23%
8 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	192 org/bln	192 org/bln	-	0%	0%	0,00	192 org/bln	112.07%
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	24 dokumen	12 dok	12 dok	12 dok	100%	0,00	24 dok	100.00%
8 01 01 2 02 03	Peleksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan	192 org/bln	192 org/bln	-	0%	0%	0,00	192 org/bln	100.00%
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 dokumen	12 dok	12 dok	12 dok	100%	0,00	24 dok	100.00%
8 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	84,50%	100%	100%	100%	0,00	92,25%	92,25%
8 01 01 2 05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 Paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	0,00	3 paket	100.00%

8 01 01 2 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	-	44 orang	44 orang	100%	0,00	44 orang	88,00%
8 01 01 2 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	8.500 orang	5.400 orang	-	-	-	0,00	5,400 org	63,52%
8 01 01 2 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang	44 orang	-	-	-	0,00	44 orang	88,00%
8 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD	100%	99,11%	100%	96,43%	96,43%	0%	97,77%	97,77%
8 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis/kali	4 jenis/kali	-	0%	0%	-	4 jenis/kali	80,00%
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	0%	5 Paket	100.00%
8 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	24 jenis/kali	24 jenis/kali	-	0%	0%	-	24 jenis/kali	100.00%
		Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang	5 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	0%	6 Paket	100.00%

8 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	28 jenis/kali	28 jenis/kali	-	0%	0%	0,00	28 jenis/kali	100.00%
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	0,00	8 Paket	100.00%
8 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	10 jenis/kali	10 jenis/kali	-	0%	0%	0,00	10 jenis/kali	100.00%
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	4 Paket	4 Paket	3 Paket	75%	0,00	8 Paket	100.00%
8 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	12 dok	12 dok	12 dok	100%	0,00	24 dok	100.00%
8 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	255 orang	255 orang	-	0%	0%	0,00	255 orang	100.00%
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	16 Laporan	7 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	0,00	15 laporan	93,75%
8 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	27 org/kali	27 org/kali	-	0%	0%	0,00	27 org/kali	100.00%
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	0,00	24 Laporan	100.00%

8 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	0,00	100,00%	100,00%
8 01 01 2 07.02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 unit	7 unit	-	-	-	0,00	7 unit	70,00%
8 01 01 2 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	0,00	5 Paket	100,00%
8 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 unit	76 unit	12 unit	12 unit	100%	0,00	88 unit	220,00%
8 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	100,00%	100,00%
8 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, internet, air dan listrik	84 rek/bln	84 rek/bln	-	0%	0%	0,00	84 rek/bln	100,00%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	0,00	24 Laporan	100,00%
8 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	90,00%	90,00%	0,00	95,00%	95,00%

8 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 unit	33 unit	17 unit	17 unit	100%	0,00	50 unit	100,00%
8 01 01 2 09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	178 unit	68 unit	25 unit	20 unit	80%	0,00	88 unit	49,43%
8 01 01 2 09 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	-	-	-	0,00	2 unit	100,00%
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memahami ideologi Pancasila	90%	81,50%	90,00%	80,00%	88,89%	0,00	80,75%	89,72%
8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	93,90%	100%	85,00%	85,00%	0,00	89,45%	89,45%

8 01 02 2 01 03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3,820 orang	3.750 org	17.260 orang	14.660 orang	85,00%	0,00	18.410 orang	100,00%
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah	28,00%	25,79%	28,00%	20,70%	73,93%	0,00	23,25%	83,02%
8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi dan pemantauan situasi politik	100%	100%	100%	89,00%	89,00%	0,00	94,50%	94,50%

8 01 03 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilu Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Kab. Pasuruan	6.854 org	3.000 orang	7.521 orang	5.900 orang	78,45%	0,00	8.900 orang	100,00%
		2 Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	48 parpol	36 parpol	9 parpol	9 parpol	100%	0,00	45 parpol	93,75%
		3 Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	2 lembaga	-	2 lembaga	2 lembaga	100%	0,00	2 lembaga	100,00%
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	95,24%	100%	50,00%	50,00%	0,00	72,62%	72,62%
8 01 04 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	100,00%	97,44%	100%	86,84%	86,84%	0,00	92,14%	92,14%

8 01 04 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	3,340 org	3.530 orang	7.500 orang	6.200 orang	82,67%	0,00	9.730 orang	100,00%
		2 Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	47 lemb	33 lemb	12 lemb	12 lemb	100,00%	0,00	45 lemb	95,74%
8 01 04 2 01 04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	116 lemb 8 Laporan	116 lemb 4 Laporan	- -	- -	- -	- -	116 lemb 4 Laporan	100,00% 50,00%
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang terfasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	100%	89,00%	89,00%	0,00	94,50%	94,50%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	100%	100%	100,00%	0,00	100,00%	100,00%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Pasuruan	3.000 orang	2.450 orang	7.300 orang	6.500 orang	89,04%	0,00	8.950 orang	298,33%
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	75,05%	100%	13,63%	13,63%	0,00	44,34%	44,34%
8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	99,15%	99,15%	0,00	99,58%	99,58%

8 01 06 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Kabupaten Pasuruan	2.100 orang	1.450 orang	11.830 orang	11.430 orang	96,62%	0,00	12.880 org	100,00%
		2 Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	13 lemb	8 lemb	5 lemb	5 lemb	100%	0,00	13 lemb	100,00%
8 01 06 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	0,00	12 Laporan	120,00%
8 01 06 2 01 05	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	0,00	1 Laporan	100,00%

Tabel 2.1.A			
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023			
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	89,72%	Capaian kinerja program kurang dari target yang telah ditentukan karena dari test dan proper test ada beberapa peserta yang masih belum memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Agar menerapkan kerangka acuan kerja dan mengubah metode sosialisasi yang dapat dipahami masyarakat sehingga capaian program dan kegiatan bisa maksimal
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	89,45%	Capaian kinerja kegiatan kurang dari target yang telah ditentukan hal ini disebabkan penambahan volume kegiatan pada saat APBD Perubahan dengan waktu yang terbatas	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100,00%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pemangku kepentingan	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	83,02%	Capaian kinerja program kurang dari target padahal peran Partai politik dan lembaga demokrasi sudah melakukan pendidikan politik namun pemahaman masyarakat belum meningkatkan	Melakukan pendidikan politik yang mudah dipahami masyarakat serta partai politik dan Anggota dewan melalui dana hibah agar melakukan pendidikan politik lebih menyeluruh dan bukan hanya untuk konstituen nya saja
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	94,50%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan hal ini disebabkan semua pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik berdasarkan capaian sub. Kegiatan 100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	129,85%	Capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Panitia Kegiatan bersama Partai Politik, KPU dan Bawaslu serta pelaksana kegiatan	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	72,62%	Capaian program kurang dari target yang ditetapkan karena berkurangnya Ormas yang berperan aktif dalam pemberdayaan organisasi	Melakukan pendekatan dan koordinasi secara aktif dengan pimpinan lembaga organisasi kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	92,14%	Capaian Kegiatan kurang dari target yang ditetapkan karena ada 2 Lembaga Ormas yang tidak mencairkan bantuan hibahnya karena ada perbedaan kepentingan didalam organisasinya	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100,00%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pelaksana kegiatan	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75,00%	Tersusunnya jadwal monitoring yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya dan didukung dengan SDM yang cukup dalam mengevaluasi dan membuat laporan	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	94,50%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan karena adanya monitoring dan evaluasi dari Pimpinan	Agar melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BNN Kabupaten Pasuruan dalam menentukan sasaran kegiatan serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan hal ini disebabkan semua pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik berdasarkan capaian sub. Kegiatan 100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100,00%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pelaksana kegiatan	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	44,34%	kurangnya komunikasi dengan Tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga penurunan konflik sosial politik belum tercapai dari target yang ditetapkan	Melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat dan Tokoh agama serta secara intensif melakukan monitoring wilayah agar setiap kejadian dapat terdeteksi dan dapat diselesaikan dengan baik.
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	Capaian kinerja sesuai target yang ditentukan hal ini disebabkan semua pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik berdasarkan capaian sub. Kegiatan 100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	100,00%	Capaian kinerja melebihi target yang ditentukan karena Adanya penambahan volume pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga targetnya melebihi target renstra yang berasal dari Pokir Dewan serta adanya persiapan dan kesiapan koordinasi yang baik antara panitia dengan pelaksana kegiatan	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	120%	Tersusunnya jadwal monitoring yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya dan didukung dengan SDM yang cukup dalam mengevaluasi dan membuat laporan	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Adanya Peran Pimpinan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan FORKOPIMDA	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati mempunyai tugas menyelenggaraan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018 - 2023, yaitu :

- a. Tujuan yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah :
” **Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik** ”
- b. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah :
” **Meningkatnya Situasi dan Kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan** ”.

Evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dilihat dari capaian indikator sasaran strategis tahun 2023 yaitu :

- 1. Persentase potensi konflik yang dapat dicegah
Penentuan Indikator ini didasarkan pada adanya Isu-isu yang berkembang di masyarakat yang mengakibatkan suatu tindakan yang mengarah pada terjadinya konflik di masyarakat.
Indikator ini membandingkan antara Potensi Konflik yang dapat dicegah terhadap potensi konflik yang akan terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat diselesaikan semuanya atau tercapai 100 %.
Adapun Formula perhitungan Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Potensi Konflik yang dapat dicegah}}{\text{Potensi Konflik yang akan terjadi}} \times 100 \%$$

- 2. Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat
Penentuan Indikator ini didasarkan pada adanya Kejadian Konflik di masyarakat yang harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan beberapa unsur masyarakat, lembaga, Instansi Pemerintah dan Pimpinan Daerah.
Indikator ini membandingkan antara Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan konflik yang terjadi dan diharapkan dapat diselesaikan semuanya atau tercapai 100 %.
Adapun Formula perhitungan Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}} \times 100 \%$$

Beberapa potensi yang bisa ditingkatkan dengan adanya program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, diantaranya yaitu :

- a. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama, suku, etnis dan golongan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang mendorong terciptanya suasana yang kondusif dalam menjalankan perekonomian di daerah;
- c. Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat dengan kewaspadaan, deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat yang akan terjadi;
- d. Kuatnya semangat kebangsaan tidak akan luntur/terpengaruh dengan adanya perkembangan berbagai teknologi informasi;
- e. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi, meningkatnya kesadaran hak berpolitik, semakin tumbuhnya budaya politik yang kuat dan stabilitas politik yang makin baik.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.2(T-C.30)

Tabel 2.2 (T-C.30)
 PENCAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
IKU (Tujuan & Sasaran) P-Renstra 2018-2023												
I	Tujuan											
	Persentase konflik sosial politik yang tertangani			100%	100%			90,90%	89,47%			Capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan hal ini karena dari 22 kasus/konflik yang terjadi hanya 20 kasus yang bisa tertangani sedangkan 2 kasus belum tertangani dengan baik
II	Sasaran											
1.	Persentase Potensi Konflik yang dapat dicegah			100%	100%			100%	100%			Capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena dari 5 kasus yang akan terjadi semuanya dapat dicegah sehingga tidak sampai terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2.	Persentase Konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat			100%	100%			88,24%	87,50%			Capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan karena dari 17 kasus/konflik yang terjadi hanya 15 kasus yang dapat diselesaikan secara musyawarah sedangkan 2 kasus belum dapat tertangani dengan baik hal ini dikarenakan ada 3 kelompok yang saling mempertahankan kepentingan masing-masing untuk mempertahankan perebutan pengolahan limbah produktif.

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			78	80			80,10	81,10			
IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 2024-2026												
I	Tujuan											
	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud					18%	20%		13,64%	18%	20%	
II	Sasaran											
1.	Persentase Kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti					94%	96%	90,90%	89,47%	94%	96%	
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			78	80	80.25	81	80,10	81,10	81,10	81,15	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang ada serta permasalahan dan hambatan yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor internal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai berikut :
 - a. belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keormasan /Organisasi sebagai sumber dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan,
 - b. Kurang SDM Pegawai dalam mendeteksi potensi konflik maupun permasalahan lain di wilayah;
 - c. Disisi lain kelemahan yang ada adalah adanya keterbatasan jumlah pegawai, terbatasnya sarana pendukung kerja yang memadai serta terbatasnya
2. Faktor eksternal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai berikut :
 - a. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan khususnya generasi muda;
 - b. Masih adanya potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok;
 - c. Permasalahan Limbah Perusahaan antara lain : Pencemaran aliran sungai akibat limbah perusahaan masih terjadi.
 - d. Permasalahan buruh dengan perusahaan terkait Upah kerja maupun UU Omnibus law Cipta kerja;
 - e. Permasalahan Konflik Tanah antara TNI dengan warga sekitar.
 - f. Meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan anak muda.
3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan :
 - a. Tantangan :
 - 1) Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah cukup luas yang merupakan daerah industri dengan banyak perusahaan dan jumlah buruh yang sangat besar sehingga rentan terjadi konflik;
 - 2) Kabupaten Pasuruan yang mayoritas penduduknya beragama Islam apabila tidak dijaga kerukunan antar umat beragama rentan terjadi konflik sosial berbasis agama ;
 - 3) Dampak perubahan Di Erga Globalisasi membuat para generasi muda terlena dan terbawa arus dengan mengadopsi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keperibadian bangsa sehingga dapat menimbulkan ancaman disintergrasi bangsa.
 - 4) Semakin luasnya peredaran narkoba di Wilayah Kab. Pasuruan.
 - b. Peluang :
 - 1) Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ormas / LSM;
 - 2) Adanya Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan Organisasi Masyarakat

untuk mendorong meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Pasuruan ;

- 3) Bekerjasama dengan Forum Koordinasi Umat Beragam (FKUB) dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan keagamaan;
- 4) Bekerjasama dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan suku, etnis dan golongan lainnya;
- 5) Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dalam rangka pencegahan dan deteksi dini terhadap tiap kejadian (konflik) di masyarakat;
- 6) Adanya kerja sama pemerintah dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan peredaran/penggunaan narkoba khususnya pada anak muda dan anak sekolah.

Berdasarkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, adalah :

1. Masih adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan dapat menjurus pada aksi-aksi anarkhisme;
2. Ancaman Ideologi Pancasila dan Keutuhan NKRI dengan semakin berkembangnya media social menyebabkan pergeseran nilai-nilai social di masyarakat. Hoax dan SARA menjadi tantangan bagi Bakesbangpol yang mengemban tugas dan fungsi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;
3. Permasalahan Pembangunan Sekolah SMK Tanoko 1 yang sudah mendapatkan ijin dari Pemerintah daerah namun karena disertai dengan pembangunan tempat ibadah mendapat pertentangan dari warga sekitar.
4. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya gesekan yang menimbulkan konflik SARA.
5. Meningkatnya Peredaran Narkoba serta Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Dari berbagai Isu strategis yang berkembang ada beberapa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub. Kegiatan prioritas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung peran FKUB melalui dana hibah tahun 2025 dalam meningkatkan Toleransi pada perwakilan Tokoh pemuda lintas agama dengan program “ **Rumah Ibadah Ramah Anak** “.
2. Melaksanakan Pemberdayaan kelompok perempuan kerukunan umat beragama melalui kegiatan Jambore dengan peserta dari utusan lintas agama.

3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang dapat menghasilkan kaderisasi handal yang dapat mendukung pembangunan daerah;
4. Sosialisasi Kerawanan Konflik Sosial dengan harapan Masyarakat bisa deteksi dini dan cegah dini konflik;
5. Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
6. Meningkatkan Sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan Narkotika untuk mengurangi tindak kriminalitas dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pasuruan ;
7. Penguatan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama yang merupakan pilar utama dalam menciptakan kondusifitas daerah.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan yang tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak semuanya dapat dimasukkan dalam Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Hal ini karena dalam Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Menyesuaikan dengan Isu-isu strategis yang sedang berkembang ;
2. Kondisi dan Kebutuhan Tahun 2025 baik jenis kegiatan maupun perencanaan Pagu Anggaran;

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.31).

TABEL 2.3 (T-C.31)
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN PASURUAN

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang sesuai regulasi	100%	Rp 5.132.000.200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang sesuai regulasi	100%	Rp 4.322.277.252	Sumber Dana DAU
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase konsistensi indikator program/ kegiatan/sub. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi	100%	Rp 39.192.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase konsistensi indikator program/ kegiatan/sub. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi	100%	Rp 41.899.000	Sumber Dana DAU
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 dok	Rp 17.301.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 dok	Rp 19.219.000	Sumber Dana DAU
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 lap	Rp 21.890.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 lap	Rp 22.680.000	Sumber Dana DAU
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Rp 3.726.425.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Rp 3.353.383.752	Sumber Dana DAU
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 org/bln	Rp 3.229.736.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 org/bln	Rp 3.239.213.652	Sumber Dana DAU
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Rp 398.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Rp 106.975.100	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan /	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan /	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
	Sub. Kegiatan			Capaian	(Rp. 000)	Sub. Kegiatan			Capaian	(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 98.449.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 7.195.000	Sumber Dana DAU
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp 92.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp 150.924.000	Sumber Dana DAU
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 orang	Rp 92.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 orang	Rp 150.924.000	Sumber Dana DAU
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah	100%	Rp 359.892.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah	100%	Rp 119.167.300	Sumber Dana DAU
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 17.019.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 2.214.000	Sumber Dana DAU
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	Rp 25.951.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	Rp 16.781.000	Sumber Dana DAU
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 96.162.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	Rp 21.432.300	Sumber Dana DAU
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	Rp 29.970.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	Rp 4.550.000	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	Rp 6.783.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	Rp 16.240.000	Sumber Dana DAU
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	Rp 18.631.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 lap	Rp 10.450.000	Sumber Dana DAU
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	Rp 165.374.400	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	Rp 47.500.000	Sumber Dana DAU
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	Rp 548.756.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	Rp 493.133.000	Sumber Dana DAU
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	Rp 400.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	Rp 447.782.000	Sumber Dana DAU
1.5.2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	Rp 21.811.600	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	Rp 4.500.000	Sumber Dana DAU
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	Rp 126.945.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	Rp 40.851.000	Sumber Dana DAU
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	Rp 106.080.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	Rp 116.373.200	Sumber Dana DAU
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 106.080.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 116.373.200	Sumber Dana DAU
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang baik	100%	Rp 259.252.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang baik	100%	Rp 47.397.000	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	Rp 237.761.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	Rp 40.667.000	Sumber Dana DAU
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	Rp 21.491.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	Rp 6.730.000	Sumber Dana DAU
2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pasuruan	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	Rp 5.861.665.700	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pasuruan	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	Rp 3.991.001.000	Sumber Dana DAU
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase realisasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat	100%	Rp 2.011.665.700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase realisasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat	100%	Rp 441.001.000	Sumber Dana DAU
			2. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	4 lemb	Rp 3.850.000.000			2. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	4 lemb	Rp 3.550.000.000	Sumber Dana DAU
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	1100 org	Rp 5.337.700.200	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	1100 org	Rp 3.729.621.000	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	250 org	Rp 27.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	250 org	Rp 8.268.000	Sumber Dana DAU
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	Rp 168.865.500	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	Rp 66.560.000	Sumber Dana DAU
2.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	Rp 327.600.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	Rp 186.552.000	Sumber Dana DAU
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	91%	Rp 2.782.873.700	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	91%	Rp 1.116.645.800	Sumber Dana DAU
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Rp 2.782.873.700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Rp 1.116.645.800	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.300 orang	Rp 1.244.873.700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.300 orang	Rp 349.089.800	Sumber Dana DAU
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 orang	Rp 28.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 orang	Rp 11.324.000	Sumber Dana DAU
3.1.3	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabupaten Pasuruan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	Rp 110.000.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabupaten Pasuruan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	Rp 31.790.000	Sumber Dana DAU
3.1.4	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paskibraka	80 orang	Rp 1.400.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paskibraka	80 orang	Rp 724.442.000	Sumber Dana DAU
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	Rp 520.200.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	Rp 1.342.482.200	Sumber Dana DAU
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	Rp 520.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	Rp 1.342.482.200	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	1300 orang	Rp 477.700.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	950 orang	Rp 1.333.930.200	Sumber Dana DAU
4.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	200 orang	Rp 22.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	200 orang	Rp 2.756.000	Sumber Dana DAU
4.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	4 Laporan	Rp 20.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	2 Laporan	Rp 5.796.000	Sumber Dana DAU
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	84%	Rp 9.100.070.000	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	84%	Rp 236.099.000	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	100%	Rp 480.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	100%	Rp 191.099.000	Sumber Dana DAU
			2. Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	9 parpol	Rp 8.620.070.000			2. Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	9 parpol	Rp 45.000.000	Sumber Dana DAU
			3. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	lembaga	Rp -			3. Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	lembaga	Rp -	Sumber Dana DAU
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	1500 org	Rp 9.078.070.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	1300 org	Rp 225.061.000	Sumber Dana DAU
5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	200 org	Rp 22.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	200 org	Rp 11.038.000	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	Persentase ormas yang berperan aktif	25%	Rp 4.194.717.700	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	Persentase ormas yang berperan aktif	25%	Rp 114.630.000	Sumber Dana DAU
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas	100%	Rp 94.717.700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	1. Persentase Realisasi Kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas	100%	Rp 39.630.000	Sumber Dana DAU
			2. Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	14 lemb	Rp 4.100.000.000			2. Jumlah ormas yang terfasilitasi	15 lemb	Rp 75.000.000	Sumber Dana DAU
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 org	Rp 4.171.842.700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	1. Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 org	Rp 102.066.000	Sumber Dana DAU
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	200 orang	Rp 15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	200 orang	Rp 6.768.000	Sumber Dana DAU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 lap	Rp 7.875.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 lap	Rp 5.796.000	Sumber Dana DAU
JUMLAH					27.591.527.300	JUMLAH					11.123.135.252

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada usulan dari beberapa Kecamatan dan tokoh masyarakat diantaranya untuk tujuan :

1. Meningkatkan Rasa Nasionalisme khususnya bagi Generasi Muda sebagai Penerus Bangsa ;
2. Meningkatkan peran partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung Pembangunan Daerah.
3. Menurunkan Kasus Penyalahgunaan Narkotika khususnya dikalangan anak muda ;
4. Meningkatkan Kewaspadaan dini dalam upaya deteksi dini dan Cegah Dini terhadap Konflik yang terjadi di masyarakat.
5. Meningkatkan Ketahanan ekonomi, social budaya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan berbagai potensi ekonomi disekitarnya.

Dari beberapa Usulan Masyarakat / Pemangku kepentingan ada kesuaian dengan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Ideologi negara dan wawasan kebangsaan.
2. Masih adanya potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok;
3. Masih tingginya kasus penyalahgunaan Narkotika.
4. Masih adanya Isu-isu konflik Sosial Politik ;
5. Masih banyaknya potensi ekonomi, social dan budaya yang belum dipahami masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi, social dan budaya.

Adapun Data usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4 (T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PASURUAN

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	91%	
	[KEGIATAN] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Masyarakat)	600 orang	Usulan Lembaga dan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6900 orang	Pokir Dewan
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2100 orang	Pokir Dewan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Wajib Militer dalam Bidang Pancasila dan Kebangsaan)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	Usulan Lembaga
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Jambore kebangsaan dengan tema "Meningkatkan Cinta Tanah Air dan Bela Negara")	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Masyarakat)	200 orang	Usulan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Jambore kebangsaan dengan tema "Meningkatkan Cinta Tanah Air dan Bela Negara")	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 orang	Pokir Dewan
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	
	[KEGIATAN] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Diklat/Pelatihan Mediator bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lembaga yang berkepentingan)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kepentingan, Kejaksaan, Pengadilan, TNI/POLRI)	100 orang	Usulan Lembaga

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Pemuda dan lintas sektor, forkopimcam dan pemerintah desa)	11035 orang	Usulan Lembaga dan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2600 orang	Pokir Dewan
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Pagelaran Seni dan Budaya dalam upaya mendukung ketahanan ekonomi dan budaya)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Masyarakat)	600 orang	Usulan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Gebyar Sholawat : 15 Paket)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3000 orang	Pokir Dewan (15 Paket)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Pagelaran Seni dan Budaya dalam upaya mendukung ketahanan ekonomi dan budaya)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	26400 orang	Pokir Dewan (132 Paket)
3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kabupaten Pasuruan	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	
	[KEGIATAN] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat	100%	
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	4 lembaga	
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Sosialisasi Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat di Kab Pasuruan)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	360 orang	Usulan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Sosialisasi Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat di Kab Pasuruan)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8900 orang	Pokir Dewan
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Bimtek Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (EKDMM))	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kasi Trantib Se-Kabupaten Pasuruan)	300 orang	Usulan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Bimtek Potensi Konflik dan Penanganannya karena event-event tertentu (pemilu, pilkada, PTSC dan isu strategis lainnya))	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kasi Trantib dan Kasipem Se-Kabupaten Pasuruan)	100 orang	Usulan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Bantuan Hibah Uang kepada Instansi Vertikal)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penerima Hibah pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 tahun	Usulan Lembaga

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif	25%	
	[KEGIATAN] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	
			Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	14 lembaga	
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Sosialisasi tentang Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Ormas)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 orang	Usulan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Sosialisasi tentang Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Ormas)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5500 orang	Pokir Dewan
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penerima Hibah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 tahun	Usulan Lembaga

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEM BAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kabupaten Pasuruan	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	84%	
	[KEGIATAN] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kabupaten Pasuruan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan	100%	
			Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	9 parpol	
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	lembaga	
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Sosialisasi Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Masyarakat)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 orang	Usulan Masyarakat
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Sosialisasi Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Masyarakat)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8700 orang	Pokir Dewan
	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Bantuan Keuangan kepada Partai Politik)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penerima Hibah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 tahun	Usulan Lembaga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional khususnya yang terkait dengan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum adalah “ Focus dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang pekerja keras, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbuka dengan talenta global untuk bermitra “.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan berdasarkan Pancasila, melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penguatan dan intervensi ideologi pancasila dan nilai - nilai kebangsaan;
- c. Peningkatan peran partai politik dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- d. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan.

Sedangkan strategi yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan wawasan kebangsaan;
2. Meningkatkan peran Partai Politik melalui pendidikan politik dan etika budaya politik.
3. Meningkatkan dan mendukung peran FKUB dalam membina toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasuruan
4. Meningkatkan antisipasi dan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik;
5. Pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat yang mendorong kearah kehidupan yang menjunjung HAM.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Pengembangan sistem politik yang demokratis;
3. Peningkatan kualitas penanganan konflik;

3.2 Tujuan dan Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai satuan kerja yang

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2024-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan adalah “ **Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah** ”.

Sesuai dengan Tujuan Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah :

“ **Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas wilayah** ”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “ **Meningkatnya Iklim Investasi Daerah** ”, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

1. Meningkatnya respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (IPOLEKSOSUBUD)

Dengan indikator sasaran adalah :

- a. Persentase kejadian konflik IPOLEKSOSUBUD yang ditindaklanjuti; Penentuan Indikator ini didasarkan pada adanya kejadian yang berkembang di masyarakat yang mengakibatkan suatu tindakan yang mengarah pada terjadinya konflik di masyarakat (kasus) yang ditindaklanjuti.

Indikator ini membandingkan antara kejadian Konflik Ipoleksosbud (kasus) di masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi total kejadian Konflik pada tahun berjalan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan Indikator sasaran “ Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh perangkat daerah pada tahun berjalan“.

Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.A				
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
Tahun 2025				
Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
TUJUAN				
Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	13,64%	18%	20%
SASARAN				
Meningkatnya Respons dan antisipasi terhadap potensi konflik Ipoleksosbud	Persentase Kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti	89,47%	94%	96%
Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,10	81,10	81,15

Tabel 3.2.B						
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU						
Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi yang tercatat dalam LKPM Online	9.400	Persentase Kejadian Konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kejadian konflik Ipoleksosbud yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kejadian Ipoleksosbud dalam 1 tahun}} \times 100\%$ Penjelasan: Kejadian konflik ipoleksosbud yang ditindaklanjuti adalah jumlah kejadian secara kumulatif yang diperoleh dari jumlah kejadian tahun ini ditambah kejadian tahun lalu yang belum ditindaklanjuti	96%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat	81,15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tabel 3.3							
IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Sub. kegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keamanan dan Kondusifitas wilayah	Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk mendukung transformasi ekonomi Inklusif	Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Toleransi, Modal Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-

3.3 Program, Kegiatan dan Sub. kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, Pemangku Kepentingan, Pemerintah Daerah serta untuk melanjutkan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, maka dalam mewujudkan keharmonisan tata kehidupan sosial masyarakat yang multikultural diperlukan adanya sinergitas pemahaman dan tindakan antisipatif dan responsif dari Pemerintah dan masyarakat, bisa dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan Forum Diskusi dengan sasaran Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Generasi Muda dan Ormas/LSM serta Partai Politik di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang bertujuan untuk memberikan arah kesepahaman guna mendeteksi dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. Program juga diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Rumusan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2025 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Hanya saja tidak semuanya dapat dimasukkan dalam Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang disebabkan oleh beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Menyesuaikan dengan Isu-isu strategis yang sedang berkembang ;
2. Kondisi dan Kebutuhan Tahun 2025 baik jenis kegiatan maupun perencanaan Pagu Anggaran;

Dalam rangka mencapai sasaran yang ingin di wujudkan pada tahun 2025, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib melakukan Pemetaan Program dan Kegiatan menurut Kodefikasi, Nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu ada 6 program dengan 12 kegiatan dan 35 sub. kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dengan kegiatan dan Sub kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan subkegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
 - Pembentukan Paskibraka

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan kegiatan dan subkegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan subkegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA, dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan subkegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan kegiatan dan sub. kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan subkegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 11.123.135.252,-** yang berlokasi tersebar diwilayah Kabupaten Pasuruan dengan sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Pelajar SMA/SMK dan organisasi kemasyarakatan/LSM yang sudah mempunyai SKT.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk mendukung terciptanya keamanan, kenyamanan dan kondusifitas wilayah Kabupaten Pasuruan yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta aspirasi masyarakat yang merupakan hasil dari Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

Penyusunan Rencana Kerja juga harus mengacu pada arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah yang akan direpresentasikan melalui Program Prioritas Perangkat Daerah dimana Pada Tahun 2023 yang lalu terdapat kenaikan kasus penyalahgunaan Narkotika sejumlah 284 orang tersangka sedangkan ditahun 2022 sejumlah 275 orang tersangka. Hal ini menjadi momentum bagi kita untuk memberikan sosialisasi kepada generasi muda ke sekolah-sekolah/ universitas untuk mencegah penyebaran penyalahgunaan narkotika maupun masyarakat untuk menanamkan pemahaman hidup sehat dari usia sedini mungkin pada anak-anaknya, maka melalui melakukan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah untuk memberikan pemahaman dan Informasi yang Akurat dan Jelas tentang Narkotika yang dapat berdampak pada Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pasuruan.

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 membutuhkan dana (anggaran) sebesar **Rp. 11.123.135.252,-** yang terdiri dari 6 Program dengan 12 Kegiatan dan 35 Sub. Kegiatan dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4 (T-C.33).

Tabel 4 (T-C.33)											
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026											
KABUPATEN PASURUAN											
Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
Unsur Pemerintahan Umum											
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik											
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang sesuai regulasi		100 %		Rp 4.322.277.252			100 %		Rp 5.733.546.900
8 01 01 2 01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator program/ kegiatan/ sub. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi		100%		Rp 41.899.000			100%		Rp 50.001.600
8 01 01 2 01 01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 dok		Rp 19.219.000	DAU		3 dok		Rp 17.301.600
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :		
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 19.219.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 17.301.600	
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :		
8 01 01 2 01 07	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan		Rp 22.680.000	DAU		12 Laporan		Rp 32.700.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :		
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 22.680.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 32.700.000	
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :		
8 01 01 2 02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%		Rp 3.353.383.752			100%		Rp 4.092.140.900
8 01 01 2 02 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	364 org/bn		Rp 3.239.213.652	DAU		26 org/bn		Rp 3.579.521.600
					- Belanja Pegawai :	Rp 3.239.213.652			- Belanja Pegawai :	Rp 3.579.521.600	
					- Belanja Barang dan Jasa :				- Belanja Barang dan Jasa :		
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :		
8 01 01 2 02 02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Dokumen		Rp 106.975.100	DAU		12 Dokumen		Rp 414.169.600
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :		
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 106.975.100			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 414.169.600	
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :		
8 01 01 2 02 03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Dokumen		Rp 7.195.000	DAU		12 Dokumen		Rp 98.449.700
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :		
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 7.195.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 98.449.700	
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Targe t Capaian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kine rja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
8 01 01 2 05	3 AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%	Rp 150.924.000				100%	Rp 99.500.000	
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44 orang		Rp 150.924.000	DAU		44 orang		Rp 99.500.000
					- Belanja Pegawai	:			- Belanja Pegawai	:	
					- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 150.924.000		- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 99.500.000
					- Belanja Modal	:			- Belanja Modal	:	
8 01 01 2 06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah		100%	Rp 119.167.300				100%	Rp 522.814.600	
8 01 01 2 06 02	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket		Rp 2.214.000	DAU		4 paket		Rp 17.019.700
					- Belanja Pegawai	:			- Belanja Pegawai	:	
					- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 2.214.000		- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 17.019.700
					- Belanja Modal	:			- Belanja Modal	:	
8 01 01 2 06 03	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket		Rp 16.781.000	DAU		4 paket		Rp 35.951.000
					- Belanja Pegawai	:			- Belanja Pegawai	:	
					- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 16.781.000		- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 35.951.000
					- Belanja Hibah	:			- Belanja Hibah	:	
8 01 01 2 06 04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket		Rp 21.432.300	DAU		4 paket		Rp 98.085.700
					- Belanja Pegawai	:	Rp -		- Belanja Pegawai	:	Rp -
					- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 21.432.300		- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 98.085.700
					- Belanja Modal	:			- Belanja Modal	:	
8 01 01 2 06 05	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 paket		Rp 4.550.000	DAU		4 paket		Rp 39.969.300
					- Belanja Pegawai	:			- Belanja Pegawai	:	
					- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 4.550.000		- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 39.969.300
					- Belanja Modal	:			- Belanja Modal	:	
8 01 01 2 06 05	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 dok		Rp 16.240.000	DAU		12 dok		Rp 16.783.000
					- Belanja Pegawai	:			- Belanja Pegawai	:	
					- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 16.240.000		- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 16.783.000
					- Belanja Modal	:			- Belanja Modal	:	
8 01 01 2 06 08	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Laporan		Rp 10.450.000	DAU		9 Laporan		Rp 49.631.500
					- Belanja Pegawai	:			- Belanja Pegawai	:	
					- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 10.450.000		- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp 49.631.500
					- Belanja Modal	:			- Belanja Modal	:	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2 06 09	7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan, Prov. Jatim dan luar Prov. Jatim	12 Laporan		Rp 47.500.000	DAU	12 Laporan		Rp 265.374.400
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 47.500.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 265.374.400
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :	
8 01 01 2 07	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	Rp 493.133.000			100%	Rp 588.756.600	
8 01 01 2 07 01	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 unit		Rp 447.782.000	DAU	1 unit		Rp 400.000.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :				- Belanja Barang dan Jasa :	
					- Belanja Modal :	Rp 447.782.000			- Belanja Modal :	Rp 400.000.000
8 01 01 2 07 02	1. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 paket		Rp 4.500.000	DAU	2 paket		Rp 218.116.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :				- Belanja Barang dan Jasa :	
					- Belanja Modal :	Rp 4.500.000			- Belanja Modal :	Rp 218.116.000
8 01 01 2 07 03	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 unit		Rp 40.851.000	DAU	14 unit		Rp 166.945.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :				- Belanja Barang dan Jasa :	
					- Belanja Modal :	Rp 40.851.000			- Belanja Modal :	Rp 166.945.000
8 01 01 2 08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%``	Rp 116.373.200			100%``	Rp 116.080.400	
8 01 01 2 08 02	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 laporan		Rp 116.373.200	DAU	12 laporan		Rp 116.080.400
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 116.373.200			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 116.080.400
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :	
8 01 01 2 09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang baik		100%	Rp 47.397.000			100%	Rp 264.252.800	
8 01 01 2 09 01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17 unit		Rp 40.667.000	DAU	14 unit		Rp 237.761.100
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 40.667.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 237.761.100
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :	
8 01 01 2 09 03	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17 unit		Rp 6.730.000	DAU	20 unit		Rp 26.491.700
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 6.730.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 26.491.700
					- Belanja Modal :				- Belanja Modal :	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti		100 %		Rp 3.991.001.000			100 %		Rp 5.961.665.700
8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase realisasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat		100%	Rp 441.001.000				100%	Rp 2.111.665.700	
		- Jumlah instansi vertikal yang terfasilitasi		4 lembaga	Rp 3.550.000.000				4 lembaga	Rp 3.850.000.000	
8 01 06 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	1.100 org		Rp 3.729.621.000	DAU		1.400 org		Rp 5.433.770.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :		
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 179.621.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 1.583.770.000	
					- Belanja Hibah :	Rp 3.550.000.000			- Belanja Hibah :	Rp 3.850.000.000	
8 01 06 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Pasuruan	250 org		Rp 8.268.000	DAU		250 org		Rp 27.500.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :		
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 8.268.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 27.500.000	
					- Belanja Hibah :	Rp -			- Belanja Hibah :	Rp -	
8 01 06 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan		Rp 66.560.000	DAU		12 Laporan		Rp 168.865.500
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :		
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 66.560.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 168.865.500	
					- Belanja Hibah :	Rp -			- Belanja Hibah :	Rp -	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 06 2 01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	12 dokumen		Rp 186.552.000	DAU	12 dokumen		Rp 327.600.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 186.552.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 327.600.000
					- Belanja Hibah :	Rp -			- Belanja Hibah :	Rp -
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		91%		Rp 1.116.645.800			91%	Rp 2.897.870.000
8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%		Rp 1.116.645.800			100%	Rp 2.897.870.000
8 01 02 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	6.300 org		Rp 349.089.800	DAU	6.400 org		Rp 1254.870.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 349.089.800			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 1254.870.000
					- Belanja Hibah :				- Belanja Hibah :	
8 01 02 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	250 org		Rp 11.324.000	DAU	250 org		Rp 28.000.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 11.324.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 28.000.000
					- Belanja Hibah :				- Belanja Hibah :	
8 01 02 2 01 07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Pemapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Pemapaskibraka	Kabupaten Pasuruan	1Dok		Rp 31.790.000	DAU	1Dok		Rp 115.000.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 31.790.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 115.000.000
					- Belanja Hibah :				- Belanja Hibah :	
8 01 02 2 01 08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kabupaten Pasuruan	80 orang		Rp 724.442.000	DAU	80 orang		Rp 1500.000.000
					- Belanja Pegawai :				- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 724.442.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 1500.000.000
					- Belanja Hibah :				- Belanja Hibah :	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 %		Rp 1.342.482.200			100 %		Rp 530.604.000
8 01 05 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	Rp 1.342.482.200				100%	Rp 530.604.000	
8 01 05 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	950 org		Rp 1.333.930.200	DAU		1300 org		Rp 483.604.000
					- Belanja Pegawai :					- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 1.333.930.200				- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 483.604.000
					- Belanja Hibah :					- Belanja Hibah :	
8 01 05 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	200 org		Rp 2.756.000	DAU		200 org		Rp 25.000.000
					- Belanja Pegawai :					- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 2.756.000				- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 25.000.000
					- Belanja Hibah :					- Belanja Hibah :	
8 01 05 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Pasuruan	2 Laporan		Rp 5.796.000	DAU		4 Laporan		Rp 22.000.000
					- Belanja Pegawai :					- Belanja Pegawai :	
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 5.796.000				- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 22.000.000
					- Belanja Hibah :					- Belanja Hibah :	
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik		84 %		Rp 236.099.000			84 %		Rp 9.282.070.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)		
8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi		100%	Rp	191.099.000			100%	Rp	662.000.000	
		- Jumlah partai politik yang terfasilitasi		9 partol	Rp	45.000.000			9 partol	Rp	8.620.070.000	
		- Jumlah instansi vertikal yang terfasilitasi		2 lembaga	Rp	-			2 lembaga	Rp	-	
8 01 03 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Daerah, Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	Kabupaten Pasuruan	1300 org		Rp	225.061.000	DAU	1700 org		Rp	9.260.070.000
					- Belanja Pegawai :			- Belanja Pegawai :				
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp	180.061.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp	640.000.000
					- Belanja Hibah :	Rp	-			- Belanja Hibah :	Rp	-
					- Bantuan Keuangan Papol :	Rp	45.000.000			- Bantuan Keuangan Papol :	Rp	8.620.070.000
8 01 03 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Daerah, Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah	Kabupaten Pasuruan	200 org		Rp	11.038.000	DAU	200 org		Rp	22.000.000
					- Belanja Pegawai :			- Belanja Pegawai :				
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp	11.038.000			- Belanja Barang dan Jasa :	Rp	22.000.000
					- Belanja Hibah :	Rp	-			- Belanja Hibah :	Rp	-
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang berperan aktif		25%	Rp	114.630.000			25%	Rp	5.329.000.000	
8 01 04 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas		100%	Rp	39.630.000			100%	Rp	829.000.000	
		- Jumlah Ormas yang terfasilitasi		15 lemb	Rp	75.000.000			14 lemb	Rp	4.500.000.000	

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 04 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	- Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	1.000 org		Rp 102.066.000	DAU		1.000 org	Rp 5.300.000.000
					- Belanja Pegawai :					- Belanja Pegawai :
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 27.066.000				- Belanja Barang dan Jasa : Rp 800.000.000
					- Belanja Hibah :	Rp 75.000.000				- Belanja Hibah : Rp 4.500.000.000
8 01 04 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	200 orang		Rp 6.768.000	DAU		200 orang	Rp 20.000.000
					- Belanja Pegawai :					- Belanja Pegawai :
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 6.768.000				- Belanja Barang dan Jasa : Rp 20.000.000
					- Belanja Hibah :					- Belanja Hibah :
8 01 04 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Kabupaten Pasuruan	2 laporan		Rp 5.796.000	DAU		2 laporan	Rp 9.000.000
					- Belanja Pegawai :					- Belanja Pegawai :
					- Belanja Barang dan Jasa :	Rp 5.796.000				- Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.000.000
					- Belanja Hibah :					- Belanja Hibah :
					11.123.135.252					29.734.756.600

Tabel 3.4													
Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024-2026													
No	Uraian Proyek Strategis	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Sub. kegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Ket
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rintisan 1 (satu) Boarding School Bertaraf Nasional dan Internasional												
	Rintisan Sister Colleges												
	Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)												
	Penambahan 20 desa ODF												
	Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP												
	Menciptakan wirausaha muda 1.000 orang												
	Rintisan 10 startup Regional dan Nasional												
	Revitalisasi Pasar Gempol												
	Revitalisasi bang kodir untuk co working space industri kreatif												
	Sertifikasi halal 10.000 produk mikro dan kecil												
	Pembangunan IPLT												
	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bangil												

Tabel 3.5				
Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah				
Tahun 2025				
Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
SINARAN (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	6.768.000,00

BAB V

P E N U T U P

Bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memudahkan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian serta sebagai bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub. Kegiatan sesuai yang telah direncanakan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang tentunya mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

Untuk meningkatkan keamanan dan kondusifitas wilayah serta dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, yaitu :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan penting dan Pokok guna mendukung pelaksanaan Tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, seperti :
 - Bekerjasama dengan BNNK Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba.
 - Meningkatkan kegiatan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat serta respons cepat terhadap berkembangnya paham radikalisme dikalangan anak muda;
 - kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - Meningkatkan pemberdayaan Organisasi masyarakat yang dapat menghasilkan kaderisasi handal yang dapat mendukung pembangunan daerah.
 - Meningkatkan Peran Partai politik dalam melakukan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Masyarakat.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik didalam internal perangkat daerah maupun antar Instansi dalam rangka sinkronisasi dan meningkatkan hubungan Kerjasama yang sinergitas.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN



Drs. EDDY SUPRIYANTO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19651220 199303 1 007

